

**TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER:
MEDIA, *HIGH-SALIENCE ISSUE*, DAN *AGENDA SETTING* DALAM PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI KASUS 17+8 TUNTUTAN RAKYAT
25 AGUSTUS- 1 SEPTEMBER 2025**

Oleh Puspa Widya Kencana, S.I.P
NPM: 2526061002



**Mata Kuliah : Kebijakan Publik dan Aplikasinya
Dosen Pengampu : Prof. Intan Fitri Meutia, Ph.D.**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**MEDIA, *HIGH-SALIENCE ISSUE*, DAN *AGENDA SETTING* DALAM PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI KASUS 17+8 TUNTUTAN RAKYAT
25 AGUSTUS- 1 SEPTEMBER 2025**

**BAB I
LATAR BELAKANG**

A. Demonstrasi Agustus-September 2025 dan Isu-Isu Publik yang Muncul

Pada akhir Agustus 2025, terjadi protes besar-besaran terhadap beberapa isu kebijakan pemerintah, salah satunya terkait isu kenaikan pendapatan anggota DPR melalui tunjangan perumahan yang diwartakan sebesar Rp50 juta per bulan. Isu ini menuai kritikan khususnya di media sosial karena pemerintah dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang mengalami himpitan ekonomi.¹ Isu ini seakan menjadi pemicu demonstrasi besar-besaran setelah sebelumnya media sosial diramaikan dengan berbagai isu kebijakan pemerintah. Aksi-aksi pada akhir Agustus 2025 memadati jalan, melibatkan mahasiswa, pekerja, hingga komunitas ojek daring, dan berujung bentrokan dengan aparat. Seiring derasnya arus kritik di media sosial, isu “gaya hidup mewah” legislatif seakan menjadi simbol “ketidakadilan” ditengah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Demonstrasi terjadi pada tanggal 25 Agustus 2025 dimana seruan demo muncul melalui pesan berantai dari *Whatsapp* juga media sosial yang merupakan ajakan dari kelompok yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia”. Ajakan ini diarahkan kepada berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa dan menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi keluarga presiden Joko Widodo dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran.² Berbeda dari Tempo, media Narasi menuliskan bahwa mobilisasi massa dilakukan melalui saluran komunikasi modern, termasuk platform X dan pesan berantai *WhatsApp* dengan tuntutan aksi yang mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu seruan utama adalah untuk membubarkan DPR. Tuntutan ini bukan hanya sekedar petisi, melainkan merupakan pernyataan kolektif tentang frustrasi terhadap perwakilan yang dianggap tidak memenuhi harapan masyarakat. Selain itu, demonstran juga menuntut penghapusan gaji dan tunjangan DPR. Permintaan ini merupakan protes terhadap anggaran negara yang dianggap tidak proporsional, dimana alokasi untuk anggota DPR dinilai lebih tinggi dibandingkan kebutuhan masyarakat yang mendesak.³ Sedangkan media CNBC Indonesia mengabungkan tuntutan demo pada tanggal 25 Agustus 2025 menjadi 9 (Sembilan) tuntutan yang antara lain penurunan Prabowo, pembubaran kabinet merah putih sampai dengan transparansi gaji dan gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR.⁴ Walaupun terdapat perbedaan berita yang disampaikan dari ketiga media tersebut, namun kesamaan yang mencolok ada pada penurunan wakil presiden dan mengagalkan kenaikan gaji anggota DPR.

Pada tanggal 28 Agustus 2025, serikat buruh menggelar unjuk rasa dengan topik berbeda. Setidaknya terdapat enam tuntutan antara lain penghapusan *outsourcing*, penolakan upah murah, stop PHK, percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan meminta DPR merevisi UU Pemilihan Umum atau Pemilu.⁵ Aksi ini terjadi tidak hanya di

¹ <https://www.kompas.id/artikel/tunjangan-dpr-melejit-ekonomi-masyarakat-masih-terimpit>

² <https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182>

³ <https://narasi.tv/read/narasi-daily/poin-poin-tuntutan-massa-dalam-aksi-demo-dpr-25-agustus-2025/2>

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250902111244-128-663534/ri-dihantam-12-demo-besar-sepanjang-2025-ini-detail-tuntutan-rakyat>

⁵ <https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182>

Jakarta, melainkan disekitar daerah seperti Surabaya, Bandung, dan Gorontalo. Di Jakarta, gelaran aksi berakhir dengan damai hingga massa buruh meninggalkan kompleks parlemen dan aksi lanjutan dilakukan beberapa Yayasan, Kelompok mahasiswa, dan masyarakat sipil di depan kompleks parlemen dan gerbang belakang. Dalam orasinya massa menyoroti tunjangan DPR yang dinilai berlebihan dan bermewah-mewahan. Aksi itu berakhir dengan tidak kondusif setelah polisi memukul mundur massa dengan gas air mata. Pada hari ini juga terjadi aksi penjarahan rumah Anggota DPR RI dan tragedi ojol dilindas rantis Brimob

Demonstrasi pada tanggal 29 Agustus 2025 didominasi oleh pengemudi ojol yang berkumpul di Mako Brimob Kwitang dan tidak lagi menasar gedung DPR. Tuntutan aksi berganti untuk mencari keadilan terhadap kematian rekan Ojol yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2025. Tidak hanya di Jakarta, aksi demonstrasi dan berujung bentrok juga terjadi di beberapa kota di Indonesia. Demonstrasi kembali digelar di sejumlah titik di Jakarta Pusat pada 30-31 Agustus 2025. Pada tanggal 31 Agustus terjadi penjarahan di rumah Menteri Keuangan sekitar dini hari.⁶ Puncaknya pada tanggal 1 September, gelombang demonstrasi terjadi di seluruh Kawasan Indonesia. Di Jakarta, demonstrasi di depan Gedung DPR didominasi oleh mahasiswa, termasuk hadir sejumlah influencer yang aktif dalam ajakan gerakan demonstrasi di media sosial dan membawa tuntutan yang diberi nama "17+8 Tuntutan Rakyat".

Tabel 1. Lini Masa Demonstrasi 25 Agustus sampai dengan 1 September 2025

Tanggal (2025)	Aktor demonstran	Isu/Tuntutan utama
25 Agustus (Senin)	Mahasiswa (berbagai kampus), pekerja, komunitas ojol dan aktivis, aksi terpusat di gedung DPR Senayan	Penolakan tunjangan DPR (terutama tunjangan perumahan Rp50 juta/bln), kritik "elitisme" dan korupsi, serukan prioritas anggaran yang pro rakyat
26 Agustus (Selasa)	Ribuan demonstran lanjutan (mahasiswa, pekerja, aktivis) di sekitar gedung DPR Senayan	Penegasan penolakan tunjangan DPR dan kebijakan pelibatan militer di ranah sipil
27 Agustus (Rabu)	Kelompok mahasiswa dan pekerja	Isu pembatalan tunjangan DPR, dorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan akuntabilitas anggaran
28 Agustus (Kamis)	Aliansi buruh/serikat, aktivis, mahasiswa, bentrokan dengan aparat	Tuntutan penghapusan <i>outsourcing</i> , penolakan upah murah, stop PHK, percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan dilanjutkan akuntabilitas dan reformasi kepolisian, serta peninjauan ulang tunjangan DPR. Aksi lain penjarahan rumah Sahroni, Anggota DPR RI
29 Agustus (Jumat)	Komunitas ojol, mahasiswa, warga, aksi di Jakarta (dan beberapa kota lain)	Eskalasi pasca meninggalnya pengemudi ojol yang tertabrak rantis Brimob. Aksi duka dan protes berlanjut menuntut penyelidikan independen, arogansi polisi, dan pencabutan fasilitas DPR
30 Agustus (Sabtu)	Demonstran di sejumlah provinsi, situasi memanas di beberapa daerah	Unjuk rasa melebar nasional, terjadi laporan penangkapan massal dan insiden kekerasan di daerah, fokus pada keadilan HAM (penangkapan sejumlah mahasiswa dan pelajar) dan kebijakan ekonomi
31 Agustus (Minggu)	Massa di Jabodetabek dan daerah, beberapa aksi menuju/di rumah pejabat	Perusakan/penjarahan di rumah Menkeu Sri Mulyani, tekanan publik kian kuat untuk mencabut tunjangan DPR dan untuk segera mengusut pelanggaran oleh aparat polisi

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-8091648/aksi-penjarahan-rumah-sahroni-hingga-sri-mulyani-mulai-diselidiki?page=4>

1 September (Senin)	Figur publik & kreator (penggagas “17+8”), jaringan mahasiswa (BEM SI), serikat/aliansi buruh (GEBRAK)	Peluncuran Tuntutan 17+8 (17 tuntutan jangka pendek s.d. 5 Sept & 8 jangka panjang s.d. 31 Aug 2026) meliputi hentikan kenaikan tunjangan DPR, penarikan militer dari fungsi sipil, reformasi/pembenahan Polri, sahkan RUU Perampasan Aset, pastikan kebijakan ekonomi adil, bebaskan demonstran, dll. Di saat yang sama BEM SI mengusung 13 tuntutan
---------------------------	--	--

Sumber diolah dari berbagai media.

Jika melihat ragam isu yang terdapat pada tabel di atas, kita bisa mengkaitkan dengan bagaimana berbagai isu dapat dirangkum dengan peluncuran tuntutan 17+8 dan bagaimana isu ini kemudian dapat terkait dengan *agenda setting* dalam proses kebijakan publik. Intermedia *agenda setting* melihat bagaimana isu mengalir dan saling mempengaruhi antar platform (media arus utama, media daring, dan jejaring sosial) melalui pola jaringan ke public. (Stern et al., 2020) menekankan dinamika jaringan antar-media yang mempercepat penyebaran isu. Isu ini menjadi penting dalam proses penyusunan kebijakan publik khususnya pada tahap pertama, yaitu mengidentifikasi masalah pada kebijakan publik. Walaupun menurut Martin, mengidentifikasi masalah ternyata lebih sulit daripada yang terlihat; sementara satu individu atau kelompok mungkin meyakini bahwa suatu masalah benar-benar ada, kelompok lain mungkin tidak berpandangan demikian (Martin, 2021). Pemilihan isu ini kemudian menjadi pertarungan dalam *venue shopping* dimana para aktor menekankan isu dan instrumen kebijakan yang agak berbeda di tiap venue hingga akhirnya mendapat perhatian untuk diidentifikasi sebagai agenda kebijakan (Lemke et al., 2023). Hal ini dikarenakan, media sosial memainkan peran yang semakin penting dalam komunikasi politik dan bagaimana media sosial digunakan untuk berbagi pandangan tentang politik dan kebijakan-kebijakan pemerintah, bahkan dapat mengorganisir dan berdemonstrasi menentang isu-isu sosial (Yang et al., 2016). Walaupun media sosial memungkinkan aksi cepat namun tantangannya ada pada pengkonsolidasian agenda menjadi kebijakan berkelanjutan. Perlu institusi dan instrumen formal karena tanpa itu, momentum bisa surut meski sempat besar (Tufekci, 2017).

B. Media Masa dan Peranan dalam Massifnya Demonstrasi 25 Agustus - 1 September 2025

Sejak awal abad ke-20, banyak teori bermunculan yang mencoba menjelaskan peran media dalam masyarakat dan dampaknya terhadap opini publik (dan sebaliknya). Dapat dikatakan bahwa teori yang paling luas diterima saat ini berakar pada teori *agenda setting* dan pengembangannya. Teori ini berpendapat bahwa media tidak mengatur apa yang dipikirkan audiens, melainkan memberi tahu mereka tentang apa yang perlu dipikirkan dengan mengendalikan konten apa yang dapat diakses (Stern et al., 2020). Twitter (atau sekarang dikenal X) memungkinkan politisi untuk menetapkan agenda politik mereka dan menjangkau audiens mereka secara langsung. Studi tentang perilaku mereka membuka peluang menjanjikan untuk memperdalam pemahaman kita tentang penetapan agenda dalam media digital. Para akademisi dari berbagai disiplin ilmu telah meneliti peran platform-platform ini dalam komunikasi politik modern (Yang et al., 2016). Sehingga definisi agenda dalam kebijakan publik mencakup semua isu yang sedang dibahas oleh media massa, kelompok kepentingan, konstituen, dan masyarakat luas (Martin, 2021).

Jika dikaitkan dalam konteks demonstrasi yang terjadi pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 1 September 2025, tentu erat kaitannya dengan peran media masa dimana isu-isu tersebut pertama kali mengemuka di media sosial, sebelum kemudian diangkat oleh media arus utama nasional dan bertransformasi menjadi agenda publik. Hal ini selaras dengan teori McCombs dan Shaw yang menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk memilih isu-isu tertentu dan menampilkannya secara sering serta menonjol, yang membuat orang memandang isu-isu

tersebut lebih penting daripada yang lain. (McCombs dan Shaw, 1972) Isu-isu yang dibawa oleh demonstran yang terjadi pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 1 September 2025 ramai diperbincangkan di media sosial sebelumnya baik secara parsial maupun konsisten yang kemudian dihipunkan oleh beberapa influencer menjadi 17+8 Tuntutan Rakyat yang menjadi viral setelahnya.

Memotret perkembangan isu publik di media sosial ini, Hidayat *dkk.* menghimpun gambaran isu kebijakan pemerintah dan wacana publik pada kurun waktu April sampai dengan Agustus tahun 2025. Adapun isu yang berkembang antara lain terkait revisi UU TNI, polemik MBG, putusan MK terkait UU ITE, dan penegakan hukum anti korupsi dengan narasi atau sentimen kunci di platform media sosial. Ia menjelaskan bahwa dari isu-isu tersebut kemudian memunculkan tagar #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap menjadi sangat viral dan media sosial sebagai kanal utama amplifikasi protes. (Hidayat & Ramadhan, 2025) Walaupun penelitian Hidayat tidak menjelaskan munculnya demonstrasi besar-besaran di akhir Agustus dan awal September karena keterbatasan waktu penelitian, namun penelitian ini memiliki korelasi penting bagaimana perkembangan isu publik di media sosial telah bergulir sebelumnya dan memicu gerakan tuntutan rakyat dan gelombang demonstrasi lanjutan. Bahwa sejak bulan April 2025 di ruang media sosial telah terjadi diskusi dan debat antar pengguna media sosial, tidak hanya masyarakat sipil namun juga berbagai elemen Masyarakat termasuk pejabat negara di dalamnya. Isu ini terfokus pada politik dan tata kelola pemerintah, yang pada gilirannya membentuk opini, pandangan, dan ekspresi di tengah masyarakat pengguna aktif media sosial.

Selain itu, peran aktif media massa dalam menampilkan berita yang tengah viral di media sosial juga memantik isu-isu ini menjadi isu nasional selaras dengan penjelasan Stern dan Yang. Misalnya, gencarnya pemberitaan tanggapan pejabat negara terhadap isu yang ramai dibahas di media sosial, memperluas cakupan informasi masyarakat yang sebelumnya hanya tersektoral di media sosial "X", "TIKTOK", ataupun "Instagram" menjadi berita resmi di laman media massa. Media menggunakan kekuatan untuk memilih isu-isu tertentu dan menampilkannya secara sering serta menonjol, yang membuat orang memandang isu-isu tersebut penting walau hanya sekedar klik bait.

C. Lahirnya 17+8 Tuntutan Rakyat

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gelombang demonstrasi 25 Agustus sampai dengan 1 September 2025 tidak terlepas dari massifnya percakapan di media sosial yang menyorot kebijakan dan tata kelola pemerintah yang memuncak dengan isu peningkatan tunjangan anggota DPR khususnya tunjangan perumahan. Selain itu, kejadian meninggalnya rekanan ojek online oleh brimob/satuan kepolisian dan kasus penjarahan memberi tekanan perhatian masyarakat, dan bahkan media internasional. Isu ini kemudian berlanjut tidak hanya kepada ketimpangan ekonomi juga menjadi sangat menonjol (*salient*) karena dibicarakan berulang, diviralkan, dan dipertegas dengan narasi ketidakadilan dan degradasi moral pejabat negara.

Dalam hitungan hari, media sosial berfungsi sebagai ruang konsolidasi, gerakan baru muncul setelah sebelumnya ramai hashtag #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap menjadi #ResetIndonesia. Puluhan butir keluhan dari komunitas buruh, mahasiswa, akademisi, dan Organisasi Masyarakat kemudian diringkas menjadi **"17+8 Tuntutan Rakyat" yang muncul akhir Agustus** oleh sejumlah influencer Ferry Irwandi (Founder Malaka Project), Salsa Erwina Hutagalung (diaspora Indonesia di Denmark), Jerome Polin (YouTuber dan influencer), dan Abigail Limuria (aktivis muda dan penulis). Postingan tersebut kompak di suarakan melalui media sosial dengan narasi tuntutan rakyat yang tersusun atas dua bagian. *Pertama*, 17 tuntutan yang mesti diselesaikan dalam satu minggu yaitu 31 Agustus 2025. *Kedua*, 8 tuntutan yang diberi batas waktu selama setahun untuk dituntaskan.

Gambar 1. 17+8 Tuntutan Rakyat

17+8 TUNTUTAN RAKYAT

Transparansi. Reformasi. Empati.

Hasil rangkuman beberapa tuntutan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir

17+8 Tuntutan Rakyat

DALAM 1 MINGGU **DEADLINE: 5 SEPT**

- ☐ Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
- ☐ Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
- ☐ Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- ☐ Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
- ☐ Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
- ☐ Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas barak. Publikasikan **transparansi anggaran** (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
- ☐ Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
- ☐ Dorong Badan Kehormatan DPR untuk **periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat**.
- ☐ Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- ☐ Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- ☐ Anggota DPR harus melibatkan diri di **ruang dialog publik** bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
- ☐ Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- ☐ Komitmen publik TNI untuk **tidak memasuki ruang sipil** selama krisis demokrasi.
- ☐ Pastikan **upah layak untuk seluruh angkatan kerja** (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
- ☐ Ambil langkah darurat untuk **mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak**.
- ☐ Buka **dialog dengan serikat buruh** untuk solusi upah minimum dan **outsourcing**.

DALAM 1 TAHUN **DEADLINE: 31/8/2026**

- ☐ Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
- ☐ Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
- ☐ Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
- ☐ Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan
- ☐ Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor
- ☐ Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis
- ☐ TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
- ☐ Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
- ☐ Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

Sumber: <https://share.google/images/FBdhgs4FRtGf4CBWu>

Tuntutan ini kemudian menjadi viral di media sosial dan media massa dan dibawa ditengah tuntutan isu demonstran dan menghasilkan tanggapan pemerintah dan kebijakan terkait penghentian atau pemangkasan fasilitas tertentu serta moratorium perjalanan luar negeri, yang diumumkan segera setelah puncak protes 1 September.

Relevansi politik dari para influencer di media sosial ini menunjukkan bahwa mereka memiliki peran dalam dinamika politik yang tidak bisa diremehkan. Pertama, influencer telah menjadi sumber informasi politik yang penting, terutama selama krisis Covid. Para influencer berperan penting dalam menyampaikan informasi dari otoritas kepada para pengikut mereka, atau kadang-kadang mempertanyakan dan menantang informasi tersebut. Kesan keterhubungan dan keaslian membuat para influencer menjadi sumber informasi yang kredibel bagi pengikut mereka, terutama di kalangan audiens khusus yang merasa bahwa suara dan pandangan mereka tidak terwakili oleh media arus utama (Van Dalen, 2023).

Pada kasus aksi demonstrasi yang terjadi pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 1 September, isu-isu dan perdebatan di media sosial dirangkum dan disebarakan secara massif dengan kekuatan influencer dalam menekankan mana isu penting dan mana isu yang harus ditonjolkan. Peran media sosial kemudian bukan hanya pemantik opini, tetapi juga *infrastructure of accountability*, dimana memungkinkan *citizen* melakukan monitoring (monitoring warga terhadap pejabat publik) dan sarana *voice and visibility* bagi kelompok masyarakat sipil. Hal ini sesuai dengan penjelasan *infrastructure of accountability* mencakup sistem sosial, teknologi, dan kelembagaan yang memungkinkan masyarakat mengawasi kekuasaan dan menuntut tanggung jawab (accountability) secara berkelanjutan. Hal ini seperti yang dijelaskan Tufekci, telah terjadi transisi historis dimana terdapat pergeseran besar dalam cara gerakan

sosial beroperasi dan bagaimana mereka menghadapi pihak yang berkuasa. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang tren budaya, politik, dan kewarganegaraan yang telah lama berlangsung dalam banyak gerakan protes, yang kemudian bertemu dengan kemudahan teknologi yang lebih baru (Tufekci, 2017).

Melalui situs/laman unggahan di media sosial, warga mendokumentasikan dan memantau tuntutan serta progresnya, menjaga tekanan pasca-keputusan dan memungkinkan evaluasi *policy feedback* ketika muncul kebijakan kompensasi di kemudian hari. Dengan demikian, “17+8” menegaskan bagaimana arsitektur komunikasi digital kini turut mendesain jalur lahirnya kebijakan dari pengangkatan isu, konsolidasi solusi, hingga pengawasan implementasi.

BAB II

FORMULASI KEBIJAKAN: PROBLEM IDENTIFICATION DAN AGENDA SETTING

A. Definisi *Agenda Setting* dalam Proses Kebijakan Publik

Pemerintah memiliki kewenangan untuk bertindak atas berbagai macam isu, meskipun mereka tidak selalu bertindak terhadap setiap persoalan publik. Sering kali, keputusan untuk bertindak merupakan hasil dari konsensus publik bahwa tindakan kolektif diinginkan dan/atau diperlukan (Stewart, Hedge, Lester, 2008 dalam Martin, 2021) Martin juga menjelaskan konseptualisasi Proses Kebijakan melalui tahapan model heuristik dalam pembuatan kebijakan publik dalam gambar berikut:

Gambar 2. *The Policymaking Process*



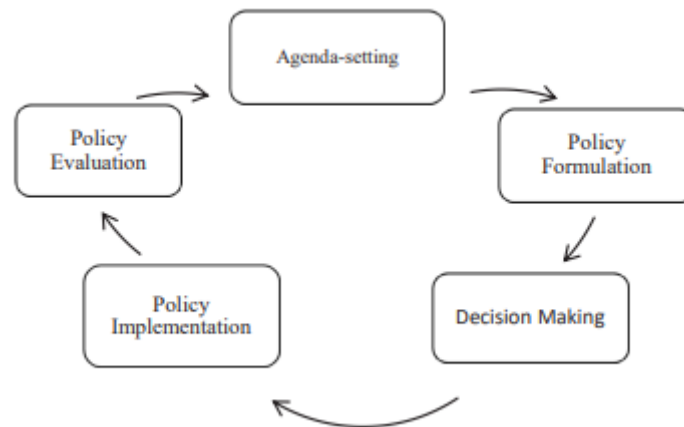
Source: Original Work Attribution: Kimberly Martin License: CC BY-SA 4.0

Harold Laswell (1951, 1956) adalah salah satu ilmuwan pertama yang menguraikan proses pengambilan keputusan kebijakan publik dalam beberapa tahap. Tahapan-tahapan yang ia rumuskan telah mengalami perkembangan, tetapi secara umum mencakup langkah-langkah berikut: (1) identifikasi masalah, (2) penetapan agenda, (3) perumusan kebijakan, (4) legitimasi kebijakan, (5) implementasi kebijakan, dan (6) evaluasi. Dari gambar 2. *The Policymaking Proses*, *agenda setting* merupakan tahap kedua setelah identifikasi permasalahan.

Septiana., dkk dalam buku “Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi” memakai pandangan Anderson dalam (Alaslan 2021:19) membedahkan lima langkah perumusan kebijakan yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Selaras dengan itu, Ripley menjelaskan proses kebijakan dalam beberapa bagian yaitu: penyusunan agenda, Legitimasi, formulasi program kebijakan, program implementasi dan termasuk dampak dan tindakan, serta *decision about the future of the policy and program*. Merangkum pendapat ini, Septiana., dkk menjelaskan pada tahapan penyusunan agenda, tahap ini adalah tahapan penyelesaian masalah publik yang akan menjadi perumusan kebijakan, sehingga perlu ketelitian dalam menilai serta mengkaji setiap permasalahan yang dihadapi (Septiana, 2023).

Alur lain yang dikutip Uzun & Furat terkait *Public Policy Proses* Adalah menurut Dye (2013), dimana menampilkan kesinambungan antara *agenda setting*, *policy formulation*, *decision-making*, *policy implementation*, dan *evaluation*. Mereka memandang bahwa proses kebijakan publik umumnya dianalisis melalui pendekatan klasik. Oleh karena itu, penjabaran lebih lanjut mengenai pendekatan klasik beserta tahapannya akan sangat membantu dalam memahami proses kebijakan public, termasuk definisi *agenda setting*. *Agenda setting* digambarkan sebagai proses “pemeriksaan terhadap seberapa penting atau prioritas suatu isu kebijakan publik bagi aktor kebijakan publik tertentu.” Meskipun penetapan agenda umumnya dipandang sebagai inisiatif masyarakat sipil, proses perumusan masalah (seperti halnya pada tahapan lain dalam proses kebijakan) lebih banyak didominasi oleh peran negara (Uzun & Furat, 2022).

Gambar 3. *Public Policy Process* (Dye)



Sumber: original Uzun & Furat, 2022

Literatur tentang *agenda setting* menunjukkan bahwa pemilihan isu yang harus mendapat perhatian kebijakan terjadi pada tahap awal proses kebijakan dan sangat berpengaruh terhadap tindakan politik selanjutnya. Para aktor kebijakan seperti lembaga negara, partai politik, kelompok kepentingan, dan pakar akademik, dihadapkan pada keterbatasan waktu dan sumber daya, sehingga mereka harus memprioritaskan isu-isu tertentu. Mereka berupaya untuk memasukkan isu-isu tersebut ke dalam agenda kebijakan (Lemke et al., 2023).

Agenda publik mencakup berbagai macam isu yang mungkin atau tidak mungkin dipertimbangkan secara serius oleh para pembuat kebijakan. Isu-isu yang saat ini menempati agenda dapat diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam beberapa tingkat atau kategori, yang menunjukkan seberapa dekat isu tersebut untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tingkat pertama dan paling luas dari agenda disebut **agenda semesta** (agenda universe). Agenda semesta mencakup semua ide yang mungkin dapat dibahas atau dipertimbangkan oleh pemerintah. Tingkat berikutnya disebut **agenda sistemik** (systemic agenda), yang mencakup semua isu yang secara umum dipersepsikan oleh anggota komunitas politik sebagai layak mendapat perhatian publik dan berada dalam yurisdiksi sah dari otoritas pemerintahan yang ada (Martin, 2021). Berbeda dengan agenda semesta yang besar dan “floating”, isu-isu yang masuk ke dalam agenda sistemik adalah isu-isu yang dapat menerima perhatian pemerintah atau yang bersedia dipertimbangkan dan ditangani oleh para pembuat kebijakan.

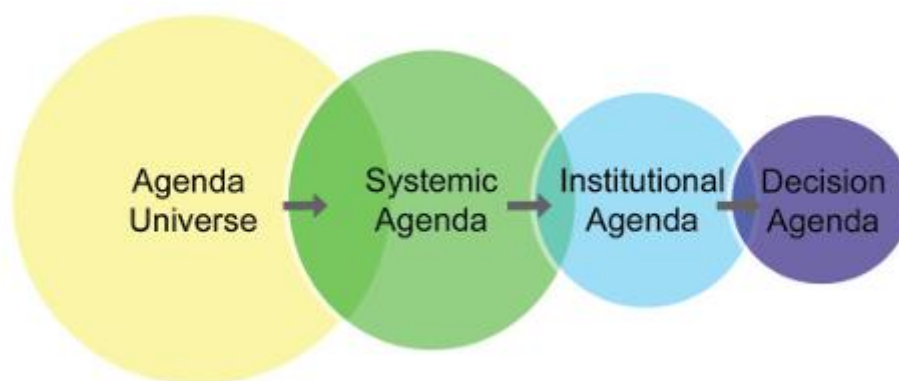
Pada proses *agenda setting*, fokus perhatian dari media massa dan pejabat publik dalam masalah publik secara khusus untuk memutuskan hal-hal yang akan diputuskan. Secara teoretis, suatu isu akan cenderung memperoleh respon dari pembuat kebijakan untuk dijadikan agenda kebijakan publik jika memenuhi beberapa kriteria tertentu. Dalam sejumlah literatur (Kimber, 1974; Salesbury, 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986 dalam Anggara, 2018) menyebutkan sebagai berikut:

- Isu tersebut telah mencapai titik kritis tertentu atau telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman serius;
- Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (impact) yang bersifat dramatis;
- Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak dan mendapat dukungan berupa liputan media massa yang luas

- d. Isu tersebut menjangkau dampak yang luas; e. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) dalam Masyarakat, dan f. Isu tersebut menyangkut suatu persediaan yang fashionable

Inti dari proses perumusan kebijakan publik itu adalah adanya tindakan dan interaksi dilingkungan masyarakat untuk menghasilkan output (luaran) atau keputusan. Interaksi inilah yang akan dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Prinsipnya tidak semua isu/masalah publik yang ada dimasyarakat dapat dianggap masalah kebijakan yang harus masuk kedalam agenda pemerintah untuk diproses menjadi sebuah kebijakan (Alaslan, 2021:36 dalam Septiana, 2023). Masalah tersebut harus dilakukan melalui berbagai tahapan mengidentifikasi masalahnya, merumuskan dan menilai alternatifnya, kemudian memilih yang paling relevan untuk di masukan dalam agenda kebijakan pemerintah yang akan diruskan untuk diputuskan.

Gambar 4. *Agenda levels and sample policies.*



Source: Original Work Attribution: Kimberly Martin License: CC BY SA 4.0 dalam (Martin, 2021)

Kebijakan yang berhasil naik ke tingkat berikutnya dalam agenda akan masuk ke dalam **agenda kelembagaan (institutional agenda)**. Tingkatan ini mencakup “daftar isu yang secara eksplisit sedang dipertimbangkan secara aktif dan serius”. Secara teknis, isu kebijakan yang masuk ke dalam agenda kelembagaan adalah isu-isu yang telah diformulasikan dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU) dan telah ditugaskan ke suatu komite. Beberapa kebijakan lainnya telah mencapai keberhasilan yang lebih besar dari agenda kelembagaan ke tingkat akhir dalam proses agenda, yaitu **agenda keputusan (decision agenda)**. Agenda keputusan menggambarkan masalah-masalah yang sedang secara aktif diperdebatkan oleh pemerintah untuk dicari solusinya, serta sedang dalam proses pengambilan tindakan dan keputusan konkret (Cobb & Elder, 1983; Birkland, 2019; Rinfret et al., 2019 dalam Martin, 2021) Kebijakan pada tingkat ini mencakup RUU atau resolusi yang siap untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Dalam proses *agenda setting*, kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir dan kuat memiliki keunggulan dalam membentuk agenda kebijakan. Kelompok-kelompok ini dapat menggunakan sumber daya finansial, jaringan politik, dan pengaruh lobinya untuk memperjuangkan isu-isu yang menguntungkan mereka. Pada proses penetapan agenda dapat dipengaruhi oleh opini publik, yang sering kali dibentuk oleh liputan media dan wacana politik. (Baumgartner & Jones, 1993 dalam Arafat, 2023). Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dengan memilih fakta, dan memberikan sudut pandang tertentu terhadap suatu isu. Melalui liputan dan interpretasi mereka, media dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan merespons suatu masalah. Sebagai contoh, media yang memberikan liputan yang berlebihan terhadap suatu isu dapat memicu perasaan panik atau kekhawatiran yang berlebihan di kalangan masyarakat (McCombs & Shaw, 1972).

B. Peran Media dalam *Agenda Setting* Proses Kebijakan Publik (Study Literature)

Lemke, dkk. dalam jurnal berjudul *Agenda Setting in Nascent Policy Subsystems: Issue and Instrument Priorities Across Venues*, menekankan bagaimana isu kebijakan sebagai masalah publik yang diidentifikasi oleh para aktor dalam subsistem kebijakan yang ada sebagai prioritas penting yang perlu ditangani melalui kebijakan publik baru (Lemke et al., 2023). Mengutip dari berbagai sumber, Lemke, dkk. menjelaskan bahwa selama fase *agenda setting*, para aktor secara strategis mengaitkan isu-isu tertentu untuk mendukung agenda mereka. Selain itu, para aktor mempertimbangkan isu kebijakan (atau masalah kebijakan) dan solusi kebijakan secara bersamaan. Sedangkan, solusi kebijakan sebagai instrumen kebijakan didefinisikan sebagai alat yang digunakan para aktor untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditentukan dalam agenda subsistem. Instrumen kebijakan adalah elemen yang menghubungkan semua komponen lain dalam desain kebijakan—tujuan kebijakan, pengaturan implementasi, dan kelompok sasaran.

Efek umpan balik positif seharusnya mendorong konvergensi hubungan dan prioritas antara isu dan instrumen dalam agenda suatu subsistem. Subsistem kebijakan sendiri berarti jaringan aktor yang terbentuk atau beroperasi untuk berinteraksi dan berkoordinasi dalam memengaruhi desain solusi kebijakan” (Ingold et al., 2017). Munculnya satu set isu dan instrumen yang serupa di berbagai arena dalam suatu subsistem kebijakan dapat dilihat sebagai indikator kematangan subsistem tersebut.(Lemke et al., 2023). Lemke, dkk mengutip konsensus Weible (2018) bahwa konvergensi agenda kebijakan suatu subsistem tidak berarti bahwa subsistem tersebut bebas dari konflik. Subsistem kebijakan yang diklasifikasikan matang tetap menunjukkan berbagai tingkat konflik dan consensus. Namun demikian jika digabungkan, studi tentang *agenda setting* dan instrumen kebijakan mengarah pada ekspektasi bahwa ditengah keragaman isu yang dibawa aktor kebijakan, keragaman tersebut akan berkurang seiring waktu jika subsistemnya sudah matang.

Lemke., dkk juga menekankan pentingnya media dalam *Venue shopping*. Walaupun pembahasan Lemke., dkk. tidak terfokus pada media sosial melainkan *print* media, namun media diposisikan sebagai arena penting di mana aktor kebijakan (seperti politisi, pakar, dan kelompok kepentingan) menyampaikan narasi, membingkai isu, dan mencoba memengaruhi opini publik serta pembuat kebijakan. Pada subsistem yang masih baru (contoh kasus kebijakan AI di Jerman) media menunjukkan keragaman isu dan instrumen yang diangkat oleh berbagai aktor. Aktor kebijakan yang tidak berhasil memengaruhi kebijakan di arena formal (seperti parlemen) dapat berpindah ke media untuk memperjuangkan isu mereka. Ini adalah bentuk dari *venue shopping*, di mana media menjadi tempat strategis untuk: meningkatkan visibilitas isu, menekan pembuat kebijakan, dan membangun dukungan publik.

Pada jurnal lain berjudul *Social Politics: Agenda setting and Political Communication on Social Media* yang ditulis Yang., dkk. memperlihatkan bahwa penetapan agenda adalah filter yang dilakukan oleh media massa saat memilih isu-isu tertentu dan menampilkan secara berulang dan menonjol, yang membuat orang menganggap isu-isu tersebut lebih penting daripada yang lain (Yang et al., 2016). Hal ini yang menjadikan media sosial memainkan peran yang semakin penting dan penelitian terkait “bagaimana menggunakan media sosial untuk diskusi politik, berbagi pandangan tentang politik dan kebijakan”, atau “untuk mengorganisir dan berdemonstrasi menentang isu-isu sosial” menjadi menarik dilakukan.

Penetapan agenda tingkat *pertama* berfokus pada jumlah liputan suatu isu yang menunjukkan isu-isu mana yang lebih mungkin terpapar kepada publik. Penetapan agenda tingkat *kedua*, juga disebut *framing* sebagaimana diusulkan oleh McCombs, Shaw, dan Weaver menganalisis

pengaruh *atribut sailience* (penting, relevan, atau layak diperhatikan), yaitu sifat, kualitas, karakteristik, dan hubungan. Dengan membuat beberapa isu menjadi lebih menonjol, penetapan agenda membuat isu-isu spesifik tersebut lebih mudah diakses daripada yang lain (Yang et al., 2016). Dari hasil penelitian Yang., dkk ini, bahwa adopsi isu-isu di media sosial seperti twitter (X) mempengaruhi pemerintah menetapkan agenda pada isu-isu politik utama dan cara mereka mengemas percakapan di sekitarnya sehingga dapat mengeksplorasi penetapan agenda publik.

Hal ini diperkuat dengan penjelasan Siregar., dkk bahwa media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan publik. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai agen sosial yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu-isu tertentu (Siregar et al. 2024). Juga pendapat Duetchmann bahwa agenda isu di media sosial jauh lebih luas dan besarnya volume data yang tersedia memungkinkan pemantauan percakapan sipil tentang isu-isu publik secara berkelanjutan. Sebagian pesan yang membentuk agenda isu media sosial berasal dari minat warga yang telah lama terbentuk dan sering kali bersifat emosional terhadap isu-isu tertentu (McCombs et al., 2014).

Dari bahasan jurnal di atas, bisa kita simpulkan bagaimana media massa dan media sosial dapat mempengaruhi tahap *agenda setting* dalam proses kebijakan publik. Media sosial menjadi “venue” tambahan yang mendorong isu-isu yang banyak menjadi lebih menonjol dan diperhatikan. Media sosial membantu politisi dan pejabat negara (dalam kebijakan publik) untuk menjangkau audiens langsung dan mengangkat isu secara berulang sebagai tahap pertama identifikasi isu dan *agenda setting*, sekaligus aktor lain (masyarakat, LSM, dan aktor lain yang dalam hal ini influencer) menonjolkan atribut/*framing*-nya sehingga publik menganggap isu itu menjadi penting (*high-salience issue*), bahkan dapat menjadi indikator kuat opini publik di dunia nyata. Isu yang penting (dalam hal ini viral, walaupun belum tentu penting) meningkatkan *attention* aktor kebijakan dan memaksa mereka mengaitkan masalah dengan instrumen kebijakan.

C. Isu 17+8 Tuntutan Rakyat dan Respon Pemerintah

Media sosial sepanjang 25 Agustus sampai dengan 1 September 2025 mengalami eskalasi isu “kenaikan/kemewahan tunjangan DPR” menjadi masalah publik yang menonjol (*high-salience issue*). Tagar yang viral #IndonesiaReset, poster digital 1+8 tuntutan rakyat, video demonstrasi yang tersebar luas termasuk terlindasnya driver ojek *online*, dan pernyataan pejabat negara serta narasi *influncer* memusatkan perhatian publik pada kebijakan kenaikan tunjangan yang inkonsisten dengan berlakunya Inpres 1/2025 tentang efisiensi anggaran pada awal tahun 2025. Walaupun isu kenaikan tunjangan DPR bukan menjadi isu satu-satunya dalam isu/tuntutan demonstrasi yang terjadi dalam kurun waktu 25 Agustus sampai dengan 1 September, namun lahirnya 17+8 tuntutan rakyat menjadi *framing dominan* dari semua isu dalam *venue shopping* dari berbagai arena, termasuk media. Dorongan media sosial khususnya memunculkan 17+8 tuntutan rakyat menjadi *high-salience issue*.

Isu yang semula beragam masuk dalam *agenda universe* terkait kesenjangan ekonomi, gaya hidup mewah pejabat, kemiskinan yang beralih menjadi isu pada *systemic agenda* yang layak mendapat perhatian. Isu ini kemudian beralih menjadi dominan setelah gerakan demonstrasi ditandai dengan kerusuhan, penjarahan, bahkan aksi represif aparat kepolisian sehingga menimbulkan kejadian “pembunuhan” terhadap driver ojek online. Walaupun sampai dengan awal Oktober, belum dapat dipastikan apakah isu ini masuk kedalam *institutional agenda*, sehingga melahirkan peraturan/perundang-undangan. Selain itu, jika melihat kriteria suatu isu

yang memperoleh respons dari pembuat kebijakan untuk dijadikan agenda kebijakan publik (Anggara, 2018), maka telah memenuhi lima dari enam kriteria tersebut (diluar persediaan yang fashionable). Sehingga isu ini dapat diidentifikasi menjadi “daftar isu yang secara eksplisit sedang dipertimbangkan secara aktif dan serius” jika merujuk pada respon pemerintah yang menonaktifkan 5 anggota DPR dan menganggalkan tunjangan perumahan DPR. Berikut gambar 4. Respon DPR terhadap tuntutan 17+8 yang dibuat oleh Antaranews pada tanggal 6 September 2025:

Gambar 5. Respon DPR terhadap tuntutan 17+8



Sumber: [Respons DPR terhadap tuntutan 17+8 - Infografik ANTARA News](#), tanggal 6 September 2025

Gambar 5 di atas setidaknya merangkum respon isu tuntutan 17+8 dari pemerintah/DPR. Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah dalam meredam persoalan agar tidak semakin besar dan menjadi bola liar. Kondisi Indonesia pada 25 Agustus sampai 1 September 2025 memperlihatkan bagaimana media sosial mengangkat isu tunjangan/kemewahan pejabat sebagai pemicu awal dan menstandarisasi tuntutan melalui “17+8”, memicu tekanan legitimasi lebih besar dan tindakan yang cepat. *Framing* dominan mendorong pilihan

instrumen responsive pemerintah yakni pembatalan kenaikan tunjangan (per 31 Agustus 2025) dan moratorium kunjungan ke luar negeri.

Kesimpulan dan Critical Thinking

Tulisan tugas ini secara konsep dapat menjelaskan bagaimana McCombs & Shaw (1972) melihat media “menentukan apa yang penting” lewat jumlah dan penempatan pemberitaan (postingan dalam media sosial). Publik belajar bukan hanya isu apa, tapi seberapa penting. Walaupun konsep/teori ini dikemukakan lebih dari 30 tahun yang lalu, namun masih menjadi rujukan penempatan isu dan media dalam studi kebijakan publik, politik, dan komunikasi. Banyaknya isu di media sosial dan tuntutan demonstrasi (tunjangan, upah, *outsourcing*, keadilan ojol) “dikurasi” oleh jaringan aktivis/influencer media sosial menjadi paket “17+8”, mudah diingat dan direplikasi sehingga menaikkan *salience* lintas kanal (media & medsos). Konsep (Yang et al., 2016) terkait menonjolkan atribut/*framing* oleh influencer sehingga publik menganggap isu itu menjadi penting dapat dilihat pada tulisan ini. Walaupun belum ada kerangka ukuran ataupun penjelasan bagaimana isu yang beragam bisa menjadi *salience issue* dan bias penafsiran pada beberapa studi literatur. Karena kata “penting” atau “menonjol” yang utarakan baik McCombs & Shaw dan Yang, dkk. belum memiliki definisi atau karakteristik yang lebih jelas, khususnya di media sosial.

Tulisan tugas ini juga dapat menjelaskan *agenda levels* (Martin, 2021) dimana terdapat empat level agenda sehingga isu-isu dapat dikategorikan kedalam level agenda berupa tingkat atau kategori. Hal ini menunjukkan seberapa dekat isu tersebut untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, walaupun pembagian tingkatan ini cenderung kabur. Pada kasus isu 17+8, penulis juga sulit mengidentifikasi agenda berdasarkan level semesta dan mengkaitkannya dengan kasus. Kesulitan lain dalam membahas *agenda setting* adalah pemerjemahan pada konsep tahapan proses kebijakan. Baik Martin yang mengadopsi Harold Laswell maupun Uzun & Furat yang mengutip Dye, ada perbedaan letak pemilihan isu. Martin lebih lengkap menjelaskan posisi isu dalam tahap *problem identification* sebelum proses *agenda setting*. Tulisan ini melihat bahwa tahap isu dalam *problem identification* menjadi penting dimana adanya proses menonjolkan atribut/*framing* menjadi *high-salience issue* dalam arena pemilihan *agenda setting* dapat terjadi.

Selain itu, poin menarik dalam tulisan ini juga melihat peran para influencer dalam tuntutan 17+8 dan arus informasi yang mempengaruhi pergerakan isu yang diperkuat dengan pendapat Van Dellen dan Tufekci. Walaupun menurut Van seolah influencer menjadi sumber informasi yang kredibel, namun dalam media sosial makna “kredibel” perlu dikaji lebih dalam jika menyangkut isu publik, disamping tren budaya, politik, dan kewarganegaraan tidak sama di setiap negara, khususnya negara berkembang. Namun demikian, 17+8 tuntutan rakyat yang menjadi *high-salience issue* baik di media sosial dan merambat ke media massa serta demonstrasi di lapangan, merupakan bagian baru dari gerakan protes yang kemudian bertemu dengan kemudahan teknologi. Perkembangan berbagai isu yang di/*framing* menjadi 17+8 tuntutan rakyat menjadi *high-salience issue* dan diproses ketahap selanjutnya dalam proses kebijakan, yaitu proses *agenda setting*. Perkembangan isu dari *agenda setting* ke *formulation* setidaknya dapat kita lihat dari beberapa respon pemerintah baik dari pembatalan kebijakan maupun menon-aktifkan anggota DPR termasuk pengusutan terhadap brimob dalam kasus korban pada demonstrasi 26 Agustus 2025 yang mencetuskan wacana lebih besar terkait reformasi kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arafat. (2023). *Buku Referensi Kebijakan Publik*. Litnus
- Martin, K. (2021). *Public Policy : Origins, Practice and Anaysis*.
<https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/1241>
- Septiana, A. R. (2023). Anis Ribcalia Septiana Suprpto. In *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi* (Issue May). www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Uzun, A., & Furat, B. (2022). Public Policy: Concept and Theory. *The Handbook of Public Administration, Vol. 1, 1*(January), 103–121.
- Anggara, Sahya. (2018). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia Bandung.

JURNAL:

- Hidayat, R., & Ramadhan, R. (2025). *Peran Media Sosial Dalam Mengkonstruksi Opini Publik Terkait Kebijakan Pemerintah : Studi Kasus Wacana Publik Tahun 2025. 1*, 64–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.47650/core.v3i2.2223>
- Lemke, N., Trein, P., & Varone, F. (2023). Agenda setting in nascent policy subsystems: issue and instrument priorities across venues. *Policy Sciences*, 56(4), 633–655.
<https://doi.org/10.1007/s11077-023-09514-5>
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda setting Function of Mass Media. *The Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <http://www.jstor.org/stable/2747787>
- McCombs, M. E., Shaw, D. L., & Weaver, D. H. (2014). New Directions in Agenda setting Theory and Research. *Mass Communication and Society*, 17(6), 781–802.
<https://doi.org/10.1080/15205436.2014.964871>
- Stern, S., Livan, G., & Smith, R. E. (2020). A network perspective on intermedia agenda setting. *Applied Network Science*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.1007/s41109-020-00272-4>
- Tufekci, Z. (2017). Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest. In *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*.
<https://doi.org/10.5325/bustan.11.1.0077>
- van Dalen, A. (2023). Algorithmic gatekeeping for professional communicators: Power, trust, and legitimacy. In *Algorithmic Gatekeeping for Professional Communicators: Power, Trust, and Legitimacy*. <https://doi.org/10.4324/9781003375258>
- Yang, X., Chen, B. C., Maity, M., & Ferrara, E. (2016). Social politics: Agenda setting and political communication on social media. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 10046 LNCS, 330–344. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47880-7_20

MEDIA ONLINE:

Kompas.id. (2025, Agustus 24). *Tunjangan DPR Melejit, Ekonomi Masyarakat Masih Terimpit*. Kompas.id.

<https://www.kompas.id/artikel/tunjangan-dpr-melejit-ekonomi-masyarakat-masih-terimpit>

Tempo.co. (2025, September 1). *Kronologi Demo Memprotes DPR hingga Meluas Berubah Penjarahan*. Tempo.co.

<https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182>

Narasi.tv. (2025, Agustus 25). *Poin-poin Tuntutan Massa dalam Aksi Demo DPR 25 Agustus 2025 (Halaman 2)*. Narasi Daily.

<https://narasi.tv/read/narasi-daily/poin-poin-tuntutan-massa-dalam-aksi-demo-dpr-25-agustus-2025/2>

CNBC Indonesia. (2025, September 2). *RI Dihantam 12 Demo Besar Sepanjang 2025, Ini Detail Tuntutan Rakyat*. CNBC Indonesia.

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20250902111244-128-663534/ri-dihantam-12-demo-besar-sepanjang-2025-ini-detail-tuntutan-rakyat>

Tempo.co. (2025, September 1). *Kronologi Demo Memprotes DPR hingga Meluas Berubah Penjarahan* [Artikel duplikat]. Tempo.co.

<https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182>